

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANNISA JULIANINGSIH

NPM.1721020008



PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/2021 M

**IMPLEMENTASI PERMENSOS NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo
Kabupaten Lampung Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ANNISA JULIANINGSIH

NPM. 1721020008

Pembimbing I : Drs. H. Mundzir HZ., M. Ag

Pembimbing II : Dr. Ahmad Fauzan, SHI., MH



PRODI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARI'AH

UIN RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H/ 2021 M

ABSTRAK

PKH atau Program Keluarga Harapan merupakan program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin sebagai penerimamanfaat PKH. Kriteria penerima manfaat PKH ini adalah masyarakat miskin dengan kalsifikasi seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak yang sedang dalam masa belajar dari SD sampai SMA sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat. Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam percepatan penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan SDM serta merubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok termiskin. Di Lampung Timur khususnya didesa Taman Cari, Program keluarga harapan sudah terimplementasi sejak tahun 2014. Namun, bantuan PKH ini menimbulkan berbagai macam kesenjangan sosial dalam masyarakat akibat bantuan PKH yang dirasa kurang tepat sasaran dan tidak merata. Masih adanya RTSM (rumah tangga sangat miskin) yang belum tersentuh bantuan PKH ini menjadi masalah yang menarik untuk di bahas dalam penelitian ini.

Dengan permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur menurut Permensos No.1 tahun 2018 dan Bagaimana Implementasi PKH di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Fiqh Siyasah*. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi PKH di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field-research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data-data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang mendeskripsikan atau menjabarkan secara rinci terhadap objek yang di teliti melalui data yang telah terkumpul agar dapat ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Haparan di Desa Taman Cari masih kurang sesuai. Hal ini dikarenakan terjadi kesenjangan sosial dikalangan masyarakat karena pententuan peserta PKH kurang tepat sasaran. Kurang tepatnya sasaran PKH dikarenakan koordinasi panitia PKH dengan aparat desa yang kurang baik sehingga data yang didapat bukanlah data yang sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Perlaksanaan PKH berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* sesuai dengan *siyasah dusturiyah* dan *siyasah maliyah* dikarenakan tujuannya yang sama-sama untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Julianingsih
NPM : 1721020008
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah di rujuk dan di sebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021



10000
METER
TAMU
72326AJX1804672

Annisa Julianingsih
NPM. 1721020008



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif
Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari
Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung
Timur)**

Nama : **Annisa Julianingsih**
NPM : **1721020008**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.
NIP. 195607271988031001

Dr. Ahmad Fauzan, SHL., MH.
NIK. 2019040119921004001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul : **Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)**, disusun oleh **Annisa Julianingsih, NPM: 1721020008**, Program Studi: **Hukum Tata Negara**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di **Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung** pada Hari/Tanggal : **Kamis, 29 Juli 2021**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Frenki, M.Si.**
Sekretaris : **Hervin Yoki Pradikta, M.H.I.**
Penguji I : **H. Rohmat, S.Ag., MHI.**
Penguji II : **Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag.**
Penguji III : **Dr. Ahmad Fauzan, SHL, MH.**



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Kh. Khairuddin Tahmid, M.H
NIP. 196210211993031002

v

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(Qs. An-Nisa 58)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Wagiman dan Ibunda Saminten yang sangat aku cintai. Terimakasih untuk kasih sayang, pengorban dan do'a yang telah diberikan selama ini. Terimakasih karena telah mendidik dan mengajarku cara menjadi anak yang tangguh sehingga aku tumbuh menjadi pribadi yang pantang menyerah. Berkat doa ayah dan ibu akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan skripsi ini akan menjadi bukti betapa hebatnya ayah dan ibu dalam mengajarku rasa sabar dan pantang menyerah. Semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu hadiah terindah untuk ayah dan ibu.
2. Bundaku Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang amat ku sayangi yang sudah menjadi ibuku walaupun aku tak terlahir dari rahimnya. Terimakasih atas do'a, perhatian dan supportnya sehingga aku tak pernah merasa sendiri walaupun aku berada jauh dengan orang tua.
3. Kakakku tercinta Arief Wicak Sono dan Putik Arum Mawangi serta adikku M. Ridho dan Adila Nahda Revanda yang telah memberikan do'a serta dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempat menimba ilmu pengetahuan serta pengalaman yang sangat berharga.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Annisa Julianingsih anak kedua dari empat bersaudara yang dilahirkan oleh ibu bernama Saminten pada hari sabtu tanggal 27 maret 1999 di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Memiliki seorang kakak bernama Arief Wicaksono dan dua adik yaitu Muhammad Ridho dan Adila Nahda Revanda.

Penulis menempuh pendidikan pertama yaitu di Taman Kanak-kanak Dharma Wanita Taman Cari pada tahun 2004, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Taman Cari yang selesai pada tahun 2011. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Pasa SMP Negeri 2 Purbolinggo dan selesai pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pad Skolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan mengambil jurusan Bisnis Managemen Akutansi di SMK Negeri 1 Sukadana yang selesai pada tahun 2017.

Setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, penulis mendaftarkan diri di Universitas Islam Raden Intan Lampung dan diterima sebagai mahasiswa baru pada jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah pada tahun 2017. Dan selama berkuliah di UIN penulis pernah aktif dalam UKM PIK(Pusat Informasi Konseling) dan sering membantu dan menjadi panitia dalam kegiatan UPT Pengembangan Kewirausahaan dan Karir Uin Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021
Penulis,

Annisa Julianingsih
NPM. 1721020008

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah swt karena atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dengan Judul **“Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”**, Dapat Di Selesaikan.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada tauladan terbaik sekaligus manusia paling berpengaruh di dunia Nabi Muhammad saw. Semoga shalawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan dan menjaga sunah-sunah yang beliau contohkan dalam hidupnya.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan banyak terimakasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam proses penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memimpin fakultas ini dengan sangat baik dan melaksanakan amanahnya dengan baik serta penuh dengan tanggung jawab.
3. Bapak Frenki M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, dan Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara yang telah

membantu urusan kemahasiswaan dengan sebaik mungkin.

4. Bapak Drs. H. Mundzir HZ., M.Ag selaku Pembimbing I dan Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H Selaku Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan membimbing dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara yang telah membekali dengan berbagai ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
6. Seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, terutama di Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
7. Tim Penguji yang telah banyak memberikan saran dan kritik dalam penulisan skripsi kepada Penulis, sehingga skripsi menjadi lebih baik.
8. Sahabat-sahabatku Ary Widyastuti, Tia Permata S, Umi F, Dita Jatra U, dan Anggi Apriliana yang tidak ada hentinya dalam memberikan motivasi, do'a, dukungan, saran dan masukanya. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Ahmad Fikri Baihaqi yang selalu membantu serta memberikan waktu dan tenaga dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakakku Anery Ari Ramaulan yang selalu mensupport agar skripsi ini segera selesai.
11. Teman-teman HTN D 2017 yang telah mengukir kenangan dari PBAK hingga saat ini, terimakasih untuk semangat dan dukungan yang sudah kalian berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

12. Keluarga KKN Purbolinggo yang selalu memberi semangat dan dukungan layaknya keluarga.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam bentuk moril maupun materil juga memberikan dukungan serta motivasi secara langsung maupun tidak langsung.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Akhir kata, tiada gading yang tak retak, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan skripsi ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagikita semua, *Amiin ya Robbal alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandar Lampung, 20 Juni 2021
Penulis,

Annisa Julianingsih
NPM. 1721020008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika Pembahasan.....	16

BAB II KAJIAN TEORI

A. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH

1. Pengertian Program Keluarga Harapan.....	19
2. Dasar Hukum PKH.....	20
3. Tujuan Program Keluarga Harapan.....	23
4. Ketentuan Penerima Bantuan PKH.....	24
5. Kewajiban Penerima Bantuan PKH	26
6. Dinamika PKH	26

B. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	29
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	30
3. <i>Fiqh Siyasah</i> Dalam PKH	33

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Taman Cari	46
B. Implementasi Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur	71
B. Implementasi Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang PKH di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Rekomendasi.....	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Observasi

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4 Bukti Foto Penelitian

Lampiran 5 Blanko Konsultasi

Lampiran 6 Hasil Turnitin

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tabel 3.1 Tata Guna Tanah Desa Taman Cari

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Taman Cari

Tabel 3.3 Tingkat Pendidikan di Desa Taman Cari

Tabel 3.4 Sarana dan Prasarana di Desa Taman Cari

Tabel 3.5 Indeks Bantuan PKH

Tabel 3.6 Kewajiban Peserta PKH

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan terlebih dahulu istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini secara detail. Judul skripsi ini adalah **“Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)”**. Adapun hal-hal penting yang berhubungan dengan judul tersebut sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, dan penerapan.¹ Dalam hal ini implementasi merupakan suatu tindakan atau penerapan yang dilakukan berdasarkan rencana atau aturan yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2. Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Permensos Nomor 1 tahun 2018 yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri sosial mengenai Program Keluarga Harapan sebagai upaya dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dalam skripsi ini akan dibahas tentang Pasal 3 mengenai sasaran PKH dan Pasal 7 yang berkaitan dengan kewajiban keluarga penerima bantuan PKH yang terdapat dalam Permensos Nomor 1 tahun 2018.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.95.

3. Program Keluarga Harapan

Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.²

4. Perspektif

Perspektif adalah menggambarkan sesuatu atau pandangan atas suatu hal.³ Perspektif juga sering diartikan sebagai suatu cara pandang atau sudut pandang terhadap suatu fenomena atau masalah yang sedang terjadi.

5. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan urusan umat, seluk beluk urusan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa yang sejalan dengan ajaran-ajaran syariat agar tercipta kemaslahatan umat.⁴

Berdasarkan pemaknaan kata pada judul penelitian ini, maka dapat dipahami bahwa yang maksud penelitian ini adalah untuk membahas mengenai penerapan Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang kemudian di tinjau dalam *fiqh siyasah*.

² Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

³ Op.Cit., h.119

⁴ J. Suyuthi pulunga, *Fiqh Siyasah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak,2014), h. 28

B. Latar Belakang Masalah

Permensos No. 1 tahun 2018 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Peraturan tentang Program Keluarga Harapan ini ditetapkan pada tanggal 8 januari 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 29 januari 2018. Permensos No. 1 tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan PKH. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi RTSM (Rumah Tangga sangat Miskin) yang bertujuan untuk mengurangi dan memutus rantai kemiskinan.

Seperti yang kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan masalah yang selalu ada dalam setiap negara baik dalam negara berkembang ataupun negara maju. Dalam pembangunan sebuah negara, masalah kemiskinan selalu dianggap sebagai hal yang dapat menghambat kelancaran dalam pembangunan khususnya di bidang Ekonomi. Di Indonesia, berdasarkan data BPS pada maret 2020, jumlah penduduk miskin yang ada di Indonesia mencapai 9,78% atau sekitar 26,42 juta orang dengan persentase penduduk miskin di desa dan di kota yang mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,22% dan 0,82% dari tahun sebelumnya.⁵

Kemiskinan sendiri dalam artian luas berarti ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung atau

⁵ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020) h.1.

tempat tinggal, pendidikan dan juga kesehatan.⁶ Terdapat beberapa faktor internal yang mendasari terciptanya masyarakat miskin antara lain yaitu rendahnya pendidikan yang dimiliki masyarakat, rendahnya skill yang dikuasai, rendahnya kemauan untuk mengembangkan potensi diri, tidak adanya motivasi hidup, dan sebagainya.⁷ Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terus meningkatnya angka masyarakat miskin.

Dalam Islam kemiskinan dipandang bukan sekedar ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu masalah kultural dimana masyarakat menjadi miskin karena perilaku buruk yang dilakukan seperti malas untuk bekerja dan berusaha.⁸ Tanpa adanya usaha yang dilakukan maka kemiskinan akan tetap menjadi permasalahan yang tak kunjung selesai. Allah Berfirman dalam surat Ar-Ra'd (13):11

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ..

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...”⁹

Potongan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah akan mengubah keadaan suatu kaum apabila mereka berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengubahnya. Sama halnya dengan kemiskinan, apabila seseorang dalam keadaan miskin dan berusaha dengan tekun untuk mengubah keadaannya maka Allah telah

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru* (Jakarta: Gitamedia Press, 2008), h.534

⁷ Agus Sjafari, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h.2

⁸ Aain Mahaeni, “*Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali*”, (Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014), 8.

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010). h. 250

menjamin dengan firman-Nya untuk mengubah kemiskinan menjadi kecukupan dan menjadikannya lebih baik.

Islam memandang kemiskinan sebagai sebuah musibah apabila kemiskinan tersebut telah merajalela, dengan keadaan yang buruk tersebut akan mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu yang membahayakan akhlak, melanggar hak orang lain, hingga mampu membuatnya lupa kepada Allah. Keharusan untuk mengubah kemiskinan juga di dasarkan pada firman Allah pada surat Al-Baqarah (2):268

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۚ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ
وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.”*¹⁰

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini berisikan tentang setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan, membuat manusia enggan untuk berbuat kebaikan, berinfak dan ringan dalam berbuat dosa serta kejahatan.¹¹ Dengan arti dan tafsir dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepaskan diri dari kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal kepada Allah agar terhindar dari belenggu setan yang akan menjerumuskan kita kejalan yang bathil. Selain kewajiban individu tersebut, terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan kewajiban pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui sumber dana yang jelas dan tepat.

¹⁰ *Ibid*, h.4

¹¹ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (“tt.p”: PT. Bina Ilmu, “t.t”), h. 528

Oleh karena itu dibentuklah Permensos No.1 tahun 2018 sebagai tindak lanjut peraturan sebelumnya dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan melalui PKH. Program ini telah berjalan sejak tahun 2007 dan merupakan program yang telah diunggulkan oleh pemerintah karena dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Program Keluarga Harapan ini merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan, kesehatan dan/atau kesejahteraan sosial. Tidak semua keluarga dapat menjadi bagian atau menjadi peserta PKH, hanya keluarga yang memiliki klasifikasi seperti ibu hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun, keluarga yang memiliki anak yang sedang dalam masa belajar mulai dari SD sampai SMA/ sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat.¹²

Di dalam Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa tujuan diadakannya program ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat PKH, untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH.¹³

Hampir seluruh provinsi di Indonesia telah menjalankan program PKH ini mulai dari perkotaan hingga pedesaan, walaupun belum menyeluruh. Salah satu desa yang tersentuh oleh bantuan PKH ini adalah Desa Taman Cari Kecamatan

¹² Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Pasal 5

¹³ *Ibid*, Pasal 2

Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Di desa ini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh dengan penghasilan yang tidak seberapa, hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakatnya terbelang miskin.

Program Keluarga Harapan di Kabupaten Lampung Timur sudah mulai ada sejak tahun 2014 dan menurut data terbaru tahun 2020 untuk desa Taman Cari sudah tercatat ada 209 orang anggota PKH yang telah menjadi keluarga penerima manfaat PKH.¹⁴ Namun angka ini dirasa belum mencakup seluruh masyarakat miskin yang ada di Desa Taman cari, terlihat dari masih banyaknya rumah tangga sangat miskin yang belum tersentuh bantuan PKH. Hal ini dikarenakan bantuan PKH yang kurang tepat sasaran dan tidak merata di lapangan.

Dalam konsep *Fiqh Siyasah*, masyarakat miskin merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam mensejahterakan masyarakatnya. *Fiqh siyasah* berarti tindakan pemimpin/ pemegang kekuasaan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat dengan kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.¹⁵ Dari definisi tersebut maka jelas salah satu tugas pemimpin dalam hal ini pemerintah yaitu mengentaskan kemiskinan. Dalam penelitian ini *fiqh siyasah* menjadi tolak ukur sejauh mana korelasi hukum positif dengan hukum yang bersumber pada syariat Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul skripsi ini adalah **“Implementasi Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga**

¹⁴ Ibu Saminten, Salah satu ketua kelompok PKH di Desa Taman Cari, *Wawancara*, tanggal 28 Oktober 2020

¹⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 27

Harapan Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur)”

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pasal 3 dan 7 Permensos No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari, Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana Implementasi Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur dalam perspektif *fiqh siyasah*.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan sebagai pengetahuan bagi para

pembaca khususnya yang terkait dengan judul ini.

2. Secara praktis untuk memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis, guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penulis telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka yang telah digunakan seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online lalu ditemukan beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Diantaranya yaitu:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu Yang relevan

No	Nama	Judul/Tahun	Nama Universitas	Persamaan	Perbedaan
1	Triwulandari	Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Golak-Galik Bandar Lampung/2018	UIN Raden Intan Lampung	Membahas Program Keluarga Harapan	Skripsi ini lebih fokus membahas tentang hasil pelayanan yang PKH berikan pada bidang kesehatan dan pendidikan
2	Nurul Aini	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung/2018	UIN Raden Intan Lampung	Membahas Program Keluarga Harapan	Skripsi ini meneliti tentang pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang di sediakan oleh PKH

3	Monica Martilova	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara/2019	UIN Raden Intan Lampung	Membahas Program Keluarga Harapan	Skripsi ini menggunakan perspektif politik islam
---	------------------	--	-------------------------	-----------------------------------	--

Skripsi Karya Triwulandari (2018), mahasiswi UIN Raden intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama dengan judul “*Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Golak-Galik Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas tentang pelayanan program keluarga harapan yang berfokus pada hasil pelayanan yang dilakukan selama PKH berjalan yang berfokus pada pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Skripsi karya Nurul Aini (2018), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung*”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan program keluarga harapan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin kota dengan hasil penelitian bahwa masyarakat penerima bantuan PKH mengalami banyak perubahan baik dibidang sosial maupun finansial melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang disediakan oleh Program Keluarga Harapan.

Skripsi karya Monica Martilova (2019), mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Jurusan Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Studi

Agama dengan judul “*Implementasi Program Keluarga Harapan(PKH) di Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara*”. Skripsi ini membahas tentang implementasi program keluarga harapan dalam perspektif politik islam serta apa saja faktor penghambat dalam penerapan program ini.

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan, perbedaan yang ditemukan terletak pada perspektif, hukum, dan pasal yang nantinya akan penulis tuangkan dalam skripsi ini. Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana prosedur penetapan anggota PKH dan kewajiban para penerima manfaat PKH berdasarkan Pasal 3 dan 7 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dengan tinjauan dari perspektif *fiqh siyasah*.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau pada responden.¹⁶ Penelitian lapangan ini mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dan fakta-fakta secara langsung dengan sistematis dan mendalam.¹⁷ Tujuan penelitian lapangan ini yaitu untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dalam penerapannya, selanjutnya untuk mengetahui apakah ada teori baru yang mungkin terbentuk dilapangan setelah

¹⁶ Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

¹⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 41

diadakannya penelitian.¹⁸

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif yang dimaksud adalah penelitian yang memberikan gambaran mengenai suatu individu, kelompok atau keadaan tertentu secara cermat.¹⁹ Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai implementasi Permensos No. 1 tahun 2018. Dengan sifat penelitian tersebut maka peneliti mengumpulkan data langsung ke lokasi penelitian di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo. Peneliti melakukan interaksi secara langsung kepada responden yaitu Pendamping PKH Desa Taman Cari dan masyarakat penerima bantuan PKH Desa Taman Cari.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui hasil dokumentasi, wawancara dan observasi yang dilakukan secara langsung kepada suatu objek yang sedang diteliti.²⁰ Dalam proposal skripsi ini penelitian dilakukan di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini peneliti melakukan wawancara terhadap Pendamping PKH dan warga Desa Taman Cari yang mendapatkan bantuan PKH.

b. Data Sekunder

¹⁸ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2009), h.12

¹⁹ Mely G. Tan, *Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat*, (Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990), h. 29

²⁰ Nurul Zaria, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2007), h.119.

Data Sekunder ialah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli.²¹ Data sekunder diperoleh melalui literatur, jurnal, dokumen-dokumen, buku-buku dan peraturan-peraturan seperti Permensos No.1 tahun 2018.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah dengan subjek atau objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulannya.²² Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Pendamping PKH di Desa Taman Cari dan 209 Keluarga Penerima Manfaat anggota PKH di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian atau wakil populasi yang diambil dengan metode atau cara-cara tertentu.²³ Penelitian ini menggunakan metode atau teknik *Purposive Sampling*. Menurut Notoatmodjo *Purposive Sampling* yaitu sampel yang memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat spesifik yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun sampel dalam penelitian ini 20 orang diantaranya yaitu 1 (satu) orang lurah, 5 (lima) orang kepala dusun, 1 (satu) orang tokoh agama, 1 (satu) orang tokoh masyarakat, 1 (satu) orang Pendamping PKH Desa Taman Cari dan 11 (sebelas) Orang KPM yang aktif dalam setiap kegiatan PKH di Desa Taman Cari.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 117

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 80

²³ Soeratno dan Lincollin Arsyad, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Lima*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008). h. 83

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam pengambilan data maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki. Pengamatan ini dilakukan tanpa menggunakan alat dan dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti.²⁴ Dengan demikian observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan PKH di Desa Taman Cari Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur.

b. Wawancara/*Interview*

Wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada narasumber atau responden mengenai objek yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan metode tanya jawab.²⁵ Dalam penelitian ini, wawancara/*Interview* akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga selesai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, dan undang-undang atau peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) h.26

²⁵ *Ibid*, h.95

media online.²⁶

5. Teknik Pengelolaan Data

a. Editing

Editing yaitu pengecekan atau pengoreksian kembali data yang telah terkumpul, karena data yang terkumpul masih memiliki kemungkinan tidak logis atau meragukan.²⁷

b. Koding

Koding merupakan pengklasifikasian jawaban-jawaban dari narasumber berdasarkan kategori-kategori atau memberikan catatan/tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

c. Sistematika Data

Sistematika data yang dimaksud adalah penempatan data-data berdasarkan urutan sistematika bahasan sesuai dengan rumusan masalah.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan yaitu analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif yang dimaksud artinya penelitian ini dapat menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Setelah melakukan analisa data maka penulis akan menarik kesimpulan secara kualitatif dengan menggunakan pemikiran induktif berdasarkan data yang diperoleh. Kesimpulan yang diperoleh ialah uraian kata-kata atau kalimat berdasarkan peristiwa-peristiwa

²⁶ Atwar Bajari, *Metodelogi Penelitian Komunikasi*, (Bandung; Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 106

²⁷ Susiadi AS, *Metodeologi Penelitian*, (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 112.

dan fakta-fakta yang konkrit sehingga tercipta kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami arah pembahasan dalam skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari masing-masing bab yang ada dalam skripsi ini. Sistematika penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing-masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh dan benar.

Bab pertama, ialah bab yang membahas tentang pendahuluan. Didalamnya terdapat beberapa sub bab seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dari judul skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman, selanjutnya latar belakang masalah yang berisikan awal mula munculnya sebuah pokok permasalahan yang akan menjadi pengantar dalam memahami isi penulisan skripsi, lalu dilanjutkan dengan fokus masalah agar pembahasan dalam skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data dan pengelolaan data sehingga menjadi data yang siap disajikan dalam skripsi, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua yang merupakan landasan teori, bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang diuraikan

berupa konsep dari *Fiqh Siyasah* yang nantinya akan menjadi perantara dalam menganalisa isi pembahasan berikutnya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pengertian *fiqh siyasah*, macam-macam *fiqh siyasah*, ruang lingkupnya, dan juga segala hal yang relevan untuk ditulis yang berkaitan dengan fiqh ini.

Bab ketiga berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang didalamnya terdapat dua sub bab mengenai gambaran umum tempat penelitian dan penyajian data yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh penulis.

Bab keempat yaitu bab yang membahas tentang analisis penelitian. Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan program keluarga harapan di Desa Taman Cari serta bagaimana pandangan *fiqh siyasah* dalam penerapan program tersebut.

Bab kelima yang merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan jawaban atas pertanyaan selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi kesimpulan, di bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan akan membawa dampak positif untuk penulis maupun orang lain.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan yang memberikan kontribusi yang besar dalam pengentasan kemiskinan.²⁸ Kemiskinan sendiri berarti kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya dalam mempertahankan dan mengembangkan kehidupannya yang bermartabat baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun kehidupan sosial.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Program keluarga harapan adalah program yang memberikan bantuan kepada keluarga dan/atau orang miskin dan rentan yang tercatat dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial sebagai keluarga penerima manfaat PKH.²⁹ Program ini menjamin masyarakat untuk mendapatkan hak dasar dalam kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup yang layak. Bantuan yang diberikan oleh program ini berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.³⁰

²⁸Dedy Utomo, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin," *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 2 No.1: h. 32

²⁹Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

³⁰*Ibid.*

Dalam pemenuhan hak yang nantinya akan diterima oleh para penerima manfaat PKH, ada kewajiban-kewajiban yang sebelumnya harus mereka penuhi seperti dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan para anggota PKH memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan. Hal ini berlaku pula untuk anak disabilitas yang orang tuanya tercatat sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³¹

Dalam bidang kesehatan para penerima bantuan PKH diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan untuk para lansia, pemberian asupan gizi dan imunisasi pada balita sehingga mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita.³² Dengan demikian, PKH menjadi program andalan yang diharapkan mampu untuk mengurangi bahkan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan ini dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan-peraturan yang diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial

Pada pasal 19 dijelaskan bahwa Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap

³¹Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h.1

³²Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: Kemensos RI, 2012) , h.1

orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.³³

c. Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir miskin

Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang nomor 13 tahun 2011, Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.³⁴ Pasal 3 yang berisi Fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya. Pasal 15 tentang pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyelenggarakan penyediaan pelayanan kesehatan. Dan pada pasal 16, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa.

d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasal 10 ayat 1 poin a menjelaskan bahwa jaminan yang dimaksud bertujuan untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lansia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan

³³ Pasal 19 Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

³⁴ Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.³⁵ Pasal 12 ayat 2 sampai 4 mengenai pemberian bantuan langsung berkelanjutan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai atau pelayanan dalam panti sosial dan pemberian bantuan langsung berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Negara. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara serta jumlah pemberian uang tunai diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

e. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 1 ayat 2, Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Pasal 5 ayat 1 poin a, menerangkan bahwa program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang tujuannya untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.³⁶

f. Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2015 tentang Kementrian Sosial

³⁵Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

³⁶Pasal 5 ayat 1 poin a, Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

- g. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

3. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan umum PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta merubah perilaku Rumah Tangga Sangat Miskin yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan Pemensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuan Program Keluarga Harapan yaitu:

- a. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dan mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.³⁷

Secara spesifik tujuan dari PKH ini adalah:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi rumah tangga sangat miskin;
- b. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar dari Rumah Tangga Sangat Miskin;

³⁷ Pasal 2, Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

- c. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak Rumah Tangga sangat Miskin;
- d. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak keluarga sangat miskin.³⁸

Program Keluarga Harapan akan memberikan manfaat jangka panjang dan jangka pendek kepada anggota Penerima Manfaat PKH. Untuk jangka pendek, PKH memberikan *income effect* kepada para anggota dengan bantuan berupa uang tunai yang akan diterimanya, hal ini tentu sangat membantu perekonomian keluarga sangat miskin untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.³⁹ Untuk jangka panjang, PKH menjadi alat pemutus rantai kemiskinan antar generasi melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan dan kapasitas pendapatan anak di masa depan.

4. Ketentuan Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan

Dalam pasal 3 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan bahwa “*Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial*”.⁴⁰ Calon penerima bantuan PKH ini setidaknya harus memenuhi satu atau beberapa kriteria program yaitu dimana dalam sebuah rumah tangga terdapat:

- a. Ibu hamil/menyusui

³⁸ Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan* (Ed. Revisi, 2013), h.5

³⁹ *Ibid*, h. 1

⁴⁰ *Op.cit*

- b. Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun
- c. Anak sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah atau sederajat
- d. Anak sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah atau sederajat
- e. Anak sekolah menengah atas/ masdrasah aliyah atau sederajat
- f. Anak usia 6 (enam) sampai 21 (dua puluh satu) yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun
- g. Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun
- h. Penyandang disabilitas, diutamakan penyaandang disabilitas berat

Setelah sebuah keluarga resmi ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH, maka akan diberikan kartu peserta PKH kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi, atau kakak perempuan) yang ada dalam rumah tangga sebagai bukti kepesertaan. Kartu tersebut berfungsi untuk menerima bantuan yang akan diterima dari PKH dan dapat pula digunakan sebagai kartu Jamkesmas untuk semua anggota keluarga. Namun apabila di dalam sebuah keluarga tidak terdapat perempuan dewasa yang mengurus anak pada rumah tangga, maka dapat digantikan oleh kepala keluarga.

5. Kewajiban Penerima Bantuan PKH

Setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan PKH, maka keluarga tersebut memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan berkaitan dengan komponen yang dimilikinya. Berdasarkan Permensos Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 7 dijelaskan bahwa Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk:

- a. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun; dan
- c. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

6. Dinamika Program Keluarga harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program pengentasan kemiskinan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2007. Program ini merupakan hasil evaluasi dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berbeda dengan BLT, Program Keluarga Harapan tak hanya memberikan uang tunai tetapi terdapat program-program pembelajaran tatap muka di setiap bulannya dengan tujuan terjadi perubahan perilaku warga miskin dari beberapa aspek seperti kesehatan, pendidikan dan cara berpikir (*mindset*). Program ini diperuntukkan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya dengan harapan dapat meningkatkan taraf kehidupan keluarga miskin.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada dalam setiap negara dan menjadi salah satu penghambat berkembangnya suatu negara termasuk di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah membentuk peraturan sebagai upaya

dalam pengentasan kemiskinan seperti Permensos Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini di dunia dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan menjadi salah satu program kebanggaan serta dinilai memberi dampak yang efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Sejak dimulainya program ini pada tahun 2007, PKH selalu mengalami peningkatan pada cakupan anggaran dan cakupan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di setiap tahunnya. Hal ini terlihat pada anggaran awal dalam program ini yaitu sebesar Rp.388 juta dengan sasaran 508.000 KPM, pada tahun 2018 anggaran berubah menjadi Rp.17,5 triliun untuk 10 juta KPM, hingga kenaikan terakhir pada tahun 2019 dimana anggaran untuk PKH menjadi dua kali lipat yaitu Rp.34,4 triliun dengan jumlah sasaran yang masih sama yaitu 10 juta KPM di 34 Provinsi.⁴¹

Dengan banyaknya masyarakat miskin yang terjamah oleh bantuan PKH ini maka dampak positif yang dapat dirasakan hingga saat ini yaitu mulai menurunnya angka kemiskinan di Indonesia terlihat dari data BPS pada bulan maret 2020 yang menunjukkan bahwa masyarakat miskin kota dan masyarakat miskin desa mengalami penurunan sebesar 0,82% dan 0,22%.⁴² Dampak positif lain yang terlihat seperti meningkatnya angka pendidikan anak usia sekolah, meningkatnya fasilitas kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan kesehatan terutama pada ibu hamil, balita dan lansia, serta terbentuknya

⁴¹Kiki Zakiah, *Akuntabilitas Pelaksanaan PKH Komponen Kesejahteraan Sosial* (Pusat Kajian AKN), h.5

⁴²Badan Pusat Statistik Indonesia, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020) h.1.

masyarakat dengan pemikiran maju melalui program-program yang disosialisasikan pada setiap kegiatan yang ada di PKH.

Program Keluarga Harapan telah memberi banyak manfaat dan kemudahan untuk masyarakat miskin di kota maupun di desa, namun terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam kelancaran Program PKH ini seperti kurang tepatnya sasaran dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, di beberapa kasus terjadi ketimpangan data dimana keluarga yang cukup mampu dalam membiayai kehidupan sehari-hari terdata sebagai KPM di Kementerian Sosial, sedangkan dalam verifikasi oleh pendamping PKH terdapat keluarga yang sangat miskin dan sangat memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan PKH namun namanya tidak terdaftar dalam data Kementerian Sosial.⁴³ Faktor penghambat yang lain yaitu adanya konflik antar individu dikarenakan beberapa KPM yang sudah dianggap Graduasi (sudah mengalami peningkatan pendapatan) dan harus dihentikan diberhentikan bantuan PKHnya merasa bahwa dirinya masih miskin sehingga masih berhak atas bantuan tersebut, hal ini terjadi karena masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai tujuan PKH dalam mengentaskan kemiskinan.⁴⁴ Dimana seharusnya KPM yang sudah Graduasi harus diberhentikan dari bantuan dan digantikan oleh keluarga miskin yang lebih membutuhkan sehingga program bantuan PKH menjadi merata. Permasalahan lain yaitu kurangnya sarana dan

⁴³Cahyo Sasmito, *Implementasi PKH Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan* (Journal Public Sector Innovation, Vol.3, No.2. Mei 2019), h.73

⁴⁴Dyah Ayu, *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Jurnal Administrasi Publik, Vol.2, No.12, h.4

prasarana untuk para pelaksana PKH seperti kurangnya alat yang memadai dan lemahnya koordinasi antara pendamping dan pemerintah.

B. *Fiqh Siyasah*

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Fiqh berasal dari kata *fqiha-yafqahu-fiqhan* yang berarti paham yang mendalam. Maksud dari paham yang mendalam ini dikaitkan dengan sesuatu baik ucapan maupun perilaku. Secara terminologi *fiqh* lebih dikenal dengan definisi ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatanyang dipahami dari dalil-dalil yang rinci.⁴⁵

Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Menurut Ibn Qayyin Al-Jawziyah *siyasah* sendiri dimaknai sebagai segala sesuatu yang membawa manusia ke jalan yang penuh dengan kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.⁴⁶

Fiqh Siyasah berarti memahami tujuan ucapan dan/atau tindakan tertentu secara mendalam dan akurat, pengertian ini didasarkan pada pengertian secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, *fiqh siyasah* diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' dengan memahami dalil-dalil secara rinci yang berhubungan dengan sebuah perbuatan.

⁴⁵ Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.31

⁴⁶ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.3

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang hal-hal mengenai urusan umat, pemerintahan dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan, dan kebijakan yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan untuk tujuan kemaslahatan umat berdasarkan dasar-dasar syariat Islam.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Dalam pembagiannya ruang lingkup *fiqh siyasah*, para ulama memiliki pendapat yang berbeda terkait pembagian ruang lingkup tersebut. Adayang membaginya menjadi lima bidang, empat bidang bahkan 8 bidang. Namun perbedaan yang terjadi bukanlah hal yang terlalu prinsip, karna sifatnya yang hanya sebuah teknis pembagian.

Menurut Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, beliau membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi lima bidang kebijaksanaan pemerintah yaitu *siyasah dusturriyah* (mengatur tentang peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyyah* (mengatur tentang ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyyah* (mengatur tentang peradilan), *siyasah harbiyyah* (mengatur tentang hukum perang), dan *siyasah 'idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara).⁴⁷

Adapun pembagian menurut Imam Ibn Taimiyyah dibagi menjadi empat bagian yaitu *siyasah qadha'iyyah* (mengatur tentang peradilan), *siyasah 'idariyyah* (mengatur tentang administrasi negara), *siyasah maliyyah* (mengatur

⁴⁷ *Ibid*

tentang ekonomi dan moneter) , *siyaah dauliyyah/kharijiyyah* (mengatur tentang hubungan internasional).

Berbeda dengan Imama-Mawardi dan Ibn Taimiyyah, T.M Hasbi Ash-Siddieqy membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 bagian yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik pembuatan peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (mengatur tentang administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik hubungan internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (mengatur tentang pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (mengatur tentang politik peperangan).⁴⁸

Berdasarkan pembagian ruang lingkup *fiqh siyasah* menurut para ulama tersebut, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bidang yaitu *Siyasah Dusturiyyah* yang mengkaji tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif; *Siyasah Dauliyah* mengkaji tentang hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan warga yang non-muslim yang berbeda

⁴⁸T.M Hasbi ash-Ashiddieqy, *Pengantar Siyasah Syari'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp), h.8

kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara muslim dan negara non muslim. Hukum perdata internasional ini mengatur tentang jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang antar negara. Hubungan diplomatik atau hubungan internasional yang dimaksud berupa hubungan politik kebijaksanaan negara dalam masa perang (*siyasah harbiyah*) menyangkut dasar diperbolehkannya perang, pengumuman perang, etika berperang tawanan perang serta pencatatan senjata dan damai yang menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta konsul, hak-hak istimewa, dan tugas serta kewajiban-kewajibannya; *Siyasah Maliyyah* membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.⁴⁹

3. *Fiqh Siyasah* dalam Program Keluarga Harapan

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup *fiqh siyasah*. Selanjutnya, dalam sub bab ini akan menjelaskan tentang kajian *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. *Fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan PKH yaitu pada bidang:

a. *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah tanfidziyah adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas tentang pelaksanaan Undang-undang atau peraturan. Berdasarkan trimonologi *siyasah tanfidziyah* disebut lembaga penengah dan pemberi

⁴⁹ Op.Cit., h.16

fatwa yang mengurus pelaksanaan undang-undang dan hukum yang relevan dengan situasi untuk kemaslahatan hidup manusia dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Dalam pelaksanaannya Negara memiliki lembaga eksekutif untuk menjalankan tugas tersebut. Negara sendiri memiliki kewenangan dalam menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan.⁵⁰ Peraturan atau perundang-undangan yang pemerintah lakukan berkaitan dengan hubungan dalam maupun luar negeri.

Menurut al-maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau pemimpin (khalifah). Istilah tersebut tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan kalangan dalam arti yang lebih luas lagi.

Pelaksana kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ini yaitu kepala Negara yang dibantu oleh para pembantunya yaitu para anggota kabinet atau dewan menteri yang telah dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Seperti halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari ajaran dan syariat islam, kebijakan politik eksekutif juga harus sesuai dengan nash dan kemaslahatan.⁵¹

⁵⁰ Ridwan HR, *Fiqh politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h.273

⁵¹ M. Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), h.3

Namun dikarenakan praktek pemerintahan islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah kepala Negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti Diwan al-kharuj (dewan pajak), kepolisian, wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, militer, pejabat keuangan dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif.

Berdasarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, umat Islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa pelanggaran. Wewenang atau tugas dalam *siyasah tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang sesuai dengan seharusnya dan secara detil dalam penerapannya.

Konsep *Siyasah Tanfidziyah* menurut Al-Maududi yaitu lembaga eksekutif yang berarti lembaga pelaksana memiliki tiga unsur yang harus ada dalam penerapan peraturan. Ketiga unsur tersebut ialah *al intifa'* yang berarti menggunakan, *al I'tibar* yang berarti peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud agar dapat diketahui segala sesuatu, dan *al 'islah* yang bermaksud untuk menitik beratkan kepada hubungan antar sesama manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan antar manusia dan untuk mencapai kesepakatan demi tercapainya kemaslahatan bersama.

b. *Siyasah Maliyyah*

1) Pengertian *Siyasah Maliyyah*

Siyasah Maliyyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena berhubungan dengan anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara.⁵² Dalam pengertian lain, *siyasah maliyyah* disamakan dengan politik ekonomi islam. Politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat suatu negara dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai tolak ukurnya.⁵³ Kebijakan hukum yang berkaitan dengan ekonomi ini bertujuan demi kemaslahatan rakyat dengan faktor utamanya yaitu negara, harta dan rakyat itu sendiri.

Siyasah maliyyah mengatur tentang keselarasan dan keharmonisan antara masyarakat miskin dengan masyarakat yang kaya. Dalam Islam, orang fakir, miskin dan kaum lemah sangat diperhatikan bahkan sangat dipedulikan. Kepedulian ini yang harus menjiwai kebijakan penguasa atau pemimpin agar masalah kemiskinan segera terselesaikan. Melalui *siyasah maliyyah* ini orang kaya dibuat tersentuh hatinya untuk bersikap dermawan dengan memahami penderitaan orang-orang miskin, orang miskin diharapkan selalu berikhtiar dan berdoa, sedangkan negara melaksanakan kebijakan yang mengatur mengenai zakat, infak,

⁵²Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001),h. 273

⁵³Andri Nirwana, *Fiqh siyasah maliyyah*, (Banda Aceh; Searfiqh, 2017), h. 2

shadaqah dari orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk keberkahan dari Allah.⁵⁴

2) Rung Lingkup *Siyasah Maliyyah*

Rung lingkup *siyasah maliyyah* berfokus pada bagaimana kebijakan yang diambil dapat berdampak positif untuk mengharmoniskan hubungan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan diantara keduanya tidak semakin melebar dan membuat permasalahan kemiskinan dapat teratasi.⁵⁵

3) Macam-macam *Siyasah Maliyyah*

a) Zakat

Zakat merupakan kata yang berasal dari kata *zaka-yazki-tazkiyah* yang berarti bertambah, tumbuh, berkembang, bersih dan suci. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta dengan jumlah tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat harus dikeluarkan oleh orang islam dalam rangka mengikuti perintah Allah sebagai bentuk ibadah kepada-Nya karena zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat.⁵⁶

Seperti firman Allah pada surat Al-Baqarah (2):43

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

⁵⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel pres, 2014), h. 91

⁵⁵ Tasbih, "Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam", (Jurnal Al-Fikr, 2010), h.332

⁵⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 318

*“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.”*⁵⁷

Zakat terbagi menjadi beberapa bentuk yaitu seperti zakat maal, zakat rikaz, dan zakat fitrah. Harta yang wajib dizakatkan meliputi binatang ternak, emas dan perak, atau makanan pokok seperti beras.⁵⁸ Bentuk harta-harta ini tidaklah terbatas dan dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dalam perkembangan zaman yang modern sebagai contoh zakat profesi yang merupakan pengembangan harta yang wajib dizakatkan.

Zakat bukan hanya berfungsi untuk membebaskan wajib zakat seorang *muzakki* namun memiliki definisi yang lebih dari itu, zakat merangkul dimensi sosial dan kemanusiaan didalamnya. Zakat berperan penting dalam membantu masyarakat dengan perekonomian yang lemah.⁵⁹ Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, *mu'allaf*, hamba sahaya, orang yang memiliki hutang dan belum sanggup membayarnya, *sabilillah*, dan *Ibnu sabila*.

b) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta yang berasal dari rampasan peperangan.

Dalam sejarah Islam, adanya harta rampasan perang terjadi pada

⁵⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2015), h.5

⁵⁸ Ali Ridlo, “Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab”, (Jurnal Al-‘Adl, 2, 2013), h. 5

⁵⁹ *Op.Cit.*, h. 319

perang pertama umat Islam yaitu perang Badar. Pada saat itu umat Islam mampu mengalahkan kaum Quraisy, dan sebelum turun surah Al-Anfal(8:41) mereka merampas harta kaum Quraisy serta membagi rata untuk semua umat Islam yang ikut dalam peperangan. Namun setelah turun firman Allah tersebut, pembagian *Ghanimah* dijelaskan secara jelas didalamnya. Pembagiannya meliputi 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, fakir miskin, dan *ibn sabil*. Sedangkan 4/5 untuk para bala tentara yang ikut berperang. Apabila masih terdapat sisa maka akan di simpan pada *baitul mal* untuk selanjutnya didistribusikan. Namun apabila harta berupa harta yang tidak bergerak dan asalnya merupakan milik kaum muslimin, dimana sebelum dibagikan pemiliknya telah mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya kepada pemilik sebenarnya.⁶⁰

c) *Fa'i*

Fa'i adalah harta yang didapatkan dari musuh tanpa kesulitan dan tanpa peperangan. Kondisi seperti ini terjadi seperti saat kaum kafir Bani Nadhir takut kepada umat Islam sehingga dengan tergesa-gesa meninggalkan harta benda dan kampung halamannya. Dalam surat Al-Hasyr (59:6) telah dijelaskan makna dari *fa'i* yaitu:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رَسُولَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦

⁶⁰Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Surabaya: Erlangga, 2008), h. 336

*“Dan apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”*⁶¹

Berdasarkan ayat tersebut mengapa harta rampasan disebut dengan *fa’i* karena memang di anugraahkan oleh Allah kepada kaum muslimin. Harta yang dikumpulkan dari *fa’i* menjadi harta kekayaan negara yang menjad milik administrasi baitul mal dengan tujuan untuk menolong para hamba dalam beribadah kepada-Nya.⁶²

d) *Jizyah*

Jizyah adalah pungutan yang dikenakan atas setiap kepala. Kata *jizyah* berasal dari kata *al-jaza* yang berarti balasan. Secara umum *jizyah* berarti iuran negara yang mewajibkan orang ahli kitab sebagai imbalan kepada negara karena telah telah membela, melindungi mereka dan sebagai pengimbang karena mereka telah mendapat kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.⁶³

Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan *jizyah* dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki yang sudah memenuni persyaratan seperti sudah baligh, merdeka, sehat dan mampu bekerja. *Jizyah* bertujuan untuk memberikan sebagian harta

⁶¹Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung: Dipenogoro, 2015), h.250

⁶²*Op. Cit*, h. 341

⁶³Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 229

demi kemaslahatan bersama serta sebagai imbang dari hak-hak yang telah mereka terima.

Besarannya jumlah *jizyah* yang harus dibayar relatif tergantung dengan kebijakan negara masing-masing. Pada masa daulat Bani Abbas, di bawah kepemimpinan Khalifah Harun Al-Rasyid, *jizyah* dibedakan menjadi 3 golongan yaitu untuk mereka yang kaya dikenakan *jizyah* sebesar 48 dirham, untuk golongan ekonomi menengah dikenakan *jizyah* sebesar 24 dirham dan untuk golongan petani dikenakan 12 dirham untuk *jizyah* yang diperuntukkan per kepala. Pembayarannya pun bersifat fleksibel tidak harus menggunakan uang, *jizyah* dapat dibayarkan menggunakan hewan ternak, barang dagang, hasil pertanian, dan dibayarkan setahun sekali.⁶⁴

e) *Kharaj*

Secara sederhana kharaj dapat diartikan seperti pajak tanah atau pajak bumi. Kharaj adalah hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir baik melalui perang ataupun perjanjian damai.⁶⁵ Kharaj pertama kali dikenal Islam setelah perang Khaibar dimana saat itu Rasulullah memberikan dispensasi kepada penduduk

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2014), h. 325

⁶⁵ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyyah (Keuangan Publik Islam)*, (Banda Aceh: Seafiqh Banda Aceh, 2017), h. 26

Yahudi Khaibar untuk memiliki tanah mereka dengan syarat mereka membayar sebagian hasil panennya kepada pemerintahan Islam.

f) *'Usyur*

'Usyur dapat diartikan sebagai pajak perdagangan yang dikenakan kepada pedagang non muslim yang melakukan transaksi bisnis di negara Islam.⁶⁶ Ukuran perdagangan yang dikenai pajak adalah perdagangan yang mencapai omzet senilai 20 dinar untuk emas dan 200 dirham untuk perak. Seperti halnya *jizyah*, kewajiban pajak perdagangan ini dilakukan sekali dalam setahun. Namun, dalam masa modern ini *jizyah* hampir tidak dijumpai lagi dan pajak perdagangan masih tetap berlaku hingga saat ini. Penerapannya disesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti pada saat ini penerapan pajak ini antara lain berlaku pada bea masuk barang-barang impor.

g) *Baitulmal*

Baitulmal adalah lembaga yang mengawasi keuangan negara pada masa Rasulullah yang meliputi pemasukan, pengelolaan, pengeluaran dan masalah-masalah didalamnya. Semua pendapatan atau pemasukan negara dari hal-hal yang sudah dibahas sebelumnya masuk kedalam baitulmaal. Baitulmal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan negara dan untuk membangun negara dengan ekonomi

⁶⁶Op.Cit.

modern. Tugas khusus baitulmal yaitu melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁶⁷ Mengenai pembelanjaan dan pengeluaran negara harus memperhatikan kebutuhan negara dan warganya yaitu seperti:

- (1) Untuk fakir miskin
- (2) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan negara
- (3) Untuk meningkatkan supremasi hukum
- (4) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan.
- (5) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
- (6) Untuk membangun infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
- (7) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- (8) Untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan.

h) Pengeluaran Keuangan Negara

Merupakan kebijakan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang dikeluarkan untuk menjaga kestabilan ekonomi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Prinsip penting yang harus diperhatikan adalah bahwa kebijakan tersebut harus ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan

⁶⁷Agus Marlin, *"Baitulmaal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian"*, (Jurnal akuntansi dan pajak, 2014), h.40

masyarakat dan negara. Kebijakan Rasulullah yang berkaitan dengan pengeluaran negara sebagai berikut:

- (1) Biaya pertahanan seperti persenjataan, unta dan persediaan
- (2) Penyaluran zakat dan Ushr kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-quran, termasuk para pemungut zakat.
- (3) Pembiayaan gaji untuk wali, qadi, guru, imam, mu'adzin, dan pejabat negara lainnya.
- (4) Pembayaran upah sukarelawan.
- (5) Pembayaran utang negara
- (6) Bantuan untuk musafir
- (7) Bantuan untuk orang yang belajar agama di Madinah
- (8) Hiburan untuk para delegasi keagamaan
- (9) Hadiah untuk pemerintah negara lain
- (10) Pembayaran untuk membebaskan kaum muslim yang menjadi budak
- (11) Pembayaran tunjangan untuk orang miskin, dan lain-lain.⁶⁸

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka diketahui bahwa pendapatan dan pengeluaran negara haruslah diatur dengan baik. Karena keuangan negara merupakan pilar yang sangat penting bagi kemaslahatan bersama. Karena dampaknya yang sangat luas untuk kesejahteraan perekonomian negara, semua lapisan masyarakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.

⁶⁸Adiwarnan Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ("tt": Rajawali Perss, 2016), h. 68

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, Al-siyasah Al-Syar'iyah, Kairo : Dar al-Anshar, 1977
- Adiwarnan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, "tt": Rajawali Perss, 2016
- Agus Sjaafari, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyyah (Keuangan Publik Islam), Banda Aceh: Seafiqh Banda Aceh, 2017
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Atwar Bajari, Metodologi Penelitian Komunikasi, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Badan Pusat Statistik Indonesia, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2020, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020
- Bungaran Antonius Simanjuntak, Metode Penelitian Sosial, Jakarta: Yayasan Pustaka Obot Indonesia, 2009.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Jaminan Sosial, Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, Pedoman Umum Program Keluarga Harapan, Ed. Revisi, 2013
- Direktorat Jaminan Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian RI, Pedoman Operasional PKH Bagi Pemberian Pelayanan Kesehatan, Jakarta: Kemensos RI, 2012
- Djazuli, Fiqh Siyasah, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- , Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah, ("tt.p" : "t.p", "t.t")
- Ibnu Syarif, Mujaar dan Zada, Khamami, Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008
- Jeje Abdul Rojak, Hukum Tata Negara Islam, Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014
- J. Suyuthi pulunga, Fiqih Siyasah, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Kiki Zakiah, Akuntabilitas Pelaksanaan PKH Komponen Kesejahteraan Sosial,

Pusat Kajian AKN

- Mely G. Tan, Masalah Perencanaan Penelitian Dalam Koetjaraningrat, Jakarta: Media Pustaka Utama, 1990.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta : Prenamedia Group, 2014
- Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Surabaya: Erlangga, 2008
- Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Rizal, Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik, Bandung : Pustaka Setia, 2012
- Soeratno dan Lincollin Arsyad, Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis Edisi Lima, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008.
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Susiadi AS, Metodeologi Penelitian, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014.
- T.M Hasbi ash-Ashiddieqy, Pengantar Siyasah Syari'iyah, Yogyakarta: Madah, t.tp
- Zaria Nurul, Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2007
- Aain Mahaeni, "Evaluasi Program-program Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Bali", Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Vol. X No. 1, Juli 2014.
- Agus Marlin, "Baitulmaal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian", Jurnal akuntansi dan pajak, 2014
- Ali Ridlo, "Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab", Jurnal Al-'Adl, No. 2, 2013
- Cahyo Sasmito, Implementasi PKH Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan, Journal Public Sector Innovation, Vol.3, No.2. Mei 2019
- Dedy Utomo, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga Miskin", Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No.1
- DyahAyu, Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Administrasi Publik, Vol.2, No.12

Tasbih, “Kedudukan dan Fungsi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam”, Jurnal Al-Fikr, 2010

Bapak Bagus Rahayu, Kepala Dusun V Desa Taman Cari, Wawancara, Tanggal 20 mei 2021

Bapak Eko Nugroho, Kepala Dusun II Desa Taman Cari, Wawancara, Tanggal 20 mei 2021

Ibu Endang, Peserta Program Keluarga Harapan, Wawancara, 23 mei 2021

Hendro Ahmadi, Kepala Dusun I Desa Taman Cari, Wawancara, tanggal 20 mei 2021

Joko Herianto, Kepala Dusun IV Desa Taman Cari, Wawancara, tanggal 20 mei 2021

M. Zainal Mustofa, Pendamping PKH Desa Taman Cari, Wawancara, tanggal 23 mei 2021

Saminten, Peserta PKH, Wawancara, tanggal 23 mei 2021

Sri Warni, Peserta PKH, Wawancara, tanggal 21 Mei 2021

Sugianto Edi Susanto, Kepala Desa Taman Cari, Wawancara, 20 Mei 2021

SuryoWiratno, Kepala Dusun III Desa Taman Cari, Wawancara, tanggal mei 2021

Suwarsih, Peserta PKH, Wawancara, tanggal 23 Mei 2021

Yulius Ferdi Untoro, Tokoh Masyarakat Desa Taman Cari, Wawancara, tanggal 20 Mei 2021